



PPN Brondong
BerMORAL
Berkeselamatan, Berkeadilan, Berkeadilan, dan Berkeadilan

Kata Pengantar



Dengan mengucapkan puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2025 ini dapat terselesaikan. Pelaporan ini dihasilkan dari kerja secara kolaboratif dari semua pihak di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up sehingga dapat disajikan secara faktual dan utuh namun terperinci.

Laporan Tahunan ini sebagai bentuk monitoring dan evaluasi perkembangan pembangunan dan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong serta bahan informasi pengambilan kebijakan dan penyusunan perencanaan periode selanjutnya. Laporan ini berisi refleksi dan relisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta optimalisasi pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Besar harapan kami agar laporan tahunan ini dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan mendapatkan tanggapan berupa kritik dan saran konstruktif bagi penyempurnaan laporan dimasa mendatang. Atas kerjasama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Lamongan, 31 Januari 2026
Kepala Pelabuhan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nur Alimin, S.St.Pi., M.Si



Ikhtisar Eksekutif

PPN Brondong merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP mempunyai visi “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Tugas yang diemban PPN Brondong yaitu melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan SDM berjumlah 78 orang yang terdiri Jabatan Struktural 2 orang, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 48 orang, Jabatan Fungsional Umum (JFU) 28 orang.

Pengelolaan pelabuhan perikanan mempunyai permasalahan yang kompleks karena keterkaitan dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di PPN Brondong yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat dibidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan.

Capaian kinerja PPN Brondong selama tahun 2025 yaitu:



7

Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
30,1	87,45

290,53%

8

Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
618	816

132,04%

9

Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
0,26	0,38

146,15%

10

Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
75,5	86,16

114,12%

11

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
85	100

117,65%

12

Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
88	89,20

101,36%

13

Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
87	91,67

105,37%

14

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
76	100

131,58%

15

Persentase pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
81	87,50

108,02%

16

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
92	95,41

103,71%

17

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
71,5	90,50

126,57%

18

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

<u>Target</u>	<u>Capaian</u>
88,5	92,66

104,70%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Ikhtisar Eksekutif	III
Bab I. Pendahuluan	1
A. Sejarah Singkat	1
B. Visi dan Misi	2
C. Tujuan dan Sasaran	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	4
E. Sumber Daya Manusia	5
F. Fasilitas Pokok Pelabuhan	7
G. Permasalahan dan Tantangan	22
Bab II. Kinerja Pengelolaan PPN Brondong	24
A. Kinerja Pelabuhan	24
1. Nilai PNBP	24
2. Produktivitas Perikanan Tangkap	25
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	26
4. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	29
5. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	31
6. Tata Kelola Pemerintahan di Pelabuhan Perikanan	31
B. Capaian Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan	34
1. Frekuensi Pengiriman Data PIPP	34
2. Produksi Perikanan	36
3. Nilai Produksi Perikanan	37
4. Frekuensi Kunjungan	39
5. Pendapatan Pelabuhan	41
6. Fasilitas Penyuluh, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaaan dan Publikasi	42

7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	44
8. Pelaksanaan K5	46
9. Penyaluran Air Bersih, Es dan BBM	48
10. Penyerapan Tenaga Kerja	50
11. Investor di Pelabuhan Perikanan	51
12. Penyerapan Anggaran	52
13. Pelayanan Publik	54
14. Jumlah Uang Beredar	57
15. Jumlah Kapal Perikanan	58
16. Pengembangan SDM Pengelolaan Pelabuhan	59
17. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan	60
18. Penghargaan yang Diperoleh	63
Bab III. Program Kerja KKP 2026	64
Bab IV. Penutup	65

Bab I. Pendahuluan

A. Sejarah Singkat

Perjalanan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong dimulai sejak tahun 1936 pada pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, hal ini ditandai dengan dibangunnya monumen Van der Wijck sebagai bentuk penghormatan pemerintah kolonial terhadap jasa nelayan Brondong dan sekitarnya yang telah menyelamatkan korban tenggelamnya kapal dagang milik perusahaan Belanda. Kondisi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Brondong pada saat itu masih dikelola oleh pemerintah setempat dengan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai sarana nelayan untuk melakukan pembongkaran ikan.

Seiring perjalanan dengan meningkatnya aktivitas perikanan di daerah Brondong, maka pada tahun 1978 pengelolaan PPI Brondong diambil alih oleh Pemerintah Pusat menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Brondong. Pada tahun 1986 dilakukan pengembangan PPP Brondong melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Nomor B.IX-22 CY/PP 72 Tanggal 03 November 1986 dan pada tahun 1987 status PPP Brondong Kembali dinaikkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/KPTS/410/1987 Tanggal 14 Juli 1987. Pada tahun 2001, status pengelolaan PPN Brondong dipindahkan dari Departemen Pertanian ke Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26.I/MEN/2001. Pada tahun 2010 Departemen Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Visi dan Misi

Sebagai unit pelaksana teknis yang berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah arahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, PPN Brondong memiliki visi yang sesuai dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025 yaitu **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera”** untuk mewujudkan **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**.

PPN Brondong juga menjalankan misi dari Ditjen Perikanan Tangkap yaitu melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

MISI. 1 **PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA**

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

MISI. 2 **STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING**

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

MISI. 3 **PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA**

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

MISI. 4 **PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA**

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

C. Tujuan dan Sasaran

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap, PPN Brondong melaksanakan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. 
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan.
2. 
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
3. 
Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan.
4. 
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI).
5. 
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap

Dalam mewujudkan tercapainya misi pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa Sasaran Program di PPN Brondong sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat.
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Berdaya saing
4. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal
5. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
6. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
7. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

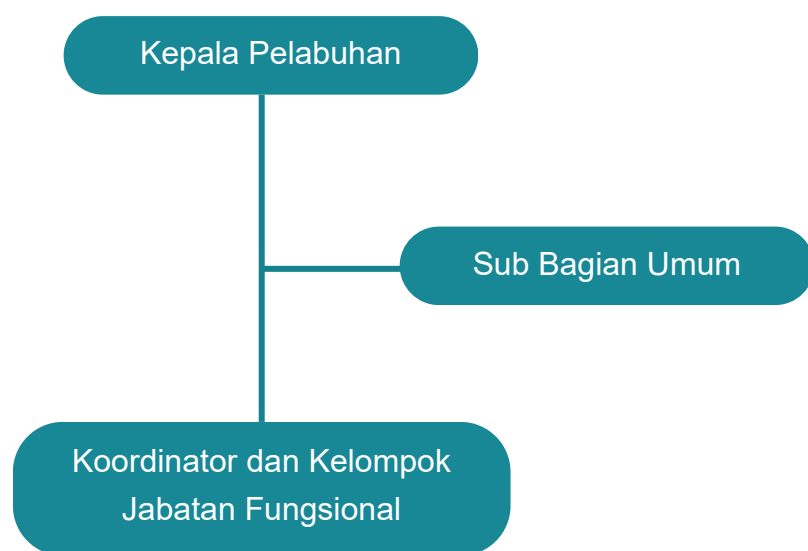
PPN Brondong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas yang diemban PPN Brondong adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPN Brondong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
15. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

E. Sumber Daya Manusia

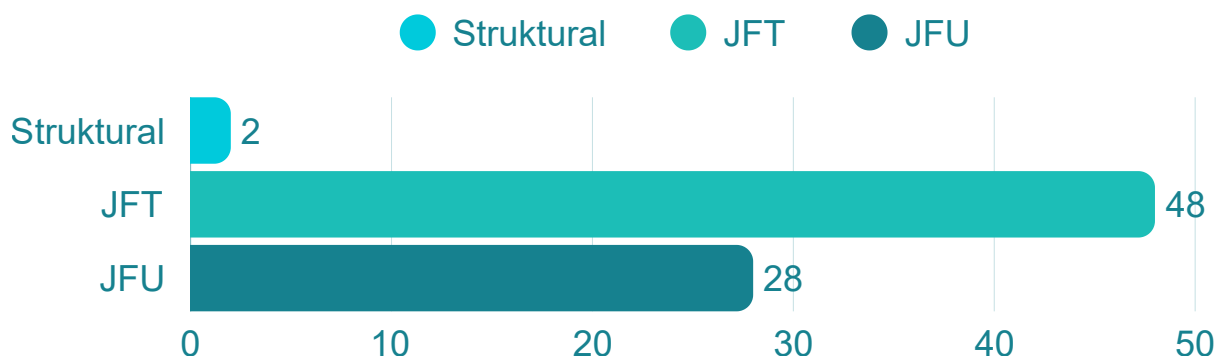
Berdasarkan Permen KP Nomor 64/PERMEN-KP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 Tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020 – Tahun 2025, susunan organisasi PPN Brondong terdiri atas:

1. Kepala Pelabuhan
2. Kepala Subbagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional



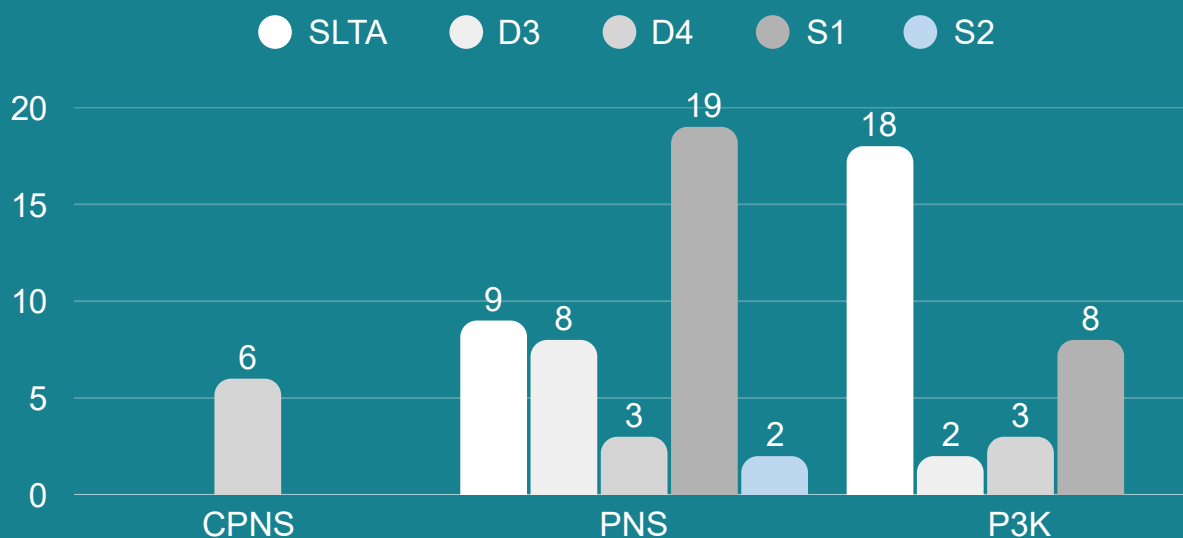
Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Brondong

Pada tahun 2025, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPN Brondong didukung oleh 78 orang pegawai yang terdiri atas Jabatan Struktural 2 orang, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 48 orang, Jabatan Fungsional Umum (JFU) 28 orang.



Gambar 2. Komposisi Pegawai di PPN Brondong pada Tahun 2025

Di lihat dari tingkat pendidikannya, komposisi pegawai PPN Brondong sebagai berikut: SUPM/SLTA/Sederajat sebanyak 26 orang, D–III sebanyak 10 orang, S–1 sebanyak 28 orang, D–IV sebanyak 12 orang, dan S–2 sebanyak 2 pegawai. Keragaan pegawai PPN Brondong berdasarkan pendidikan dan jabatan dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

Berdasarkan klasifikasi status kepegawaian jumlah pegawai berstatus PNS 47 orang (60%), PPPK 31 orang (40%) Komposisi pegawai di PPN Brondong pada tahun 2025 berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Komposisi Pegawai di PPN Brondong Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Status	Golongan/Jenis Kelamin								Jumlah		
	I		II		III		IV				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
PNS	-	-	7	2	25	12	1	-	33	14	47
PPPK	-	-	17	3	8	3	-	-	25	6	31
Jumlah	-	-	24	5	33	15	1	-	-	-	78

F. Fasilitas Pokok Pelabuhan

Fasilitas Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu fasilitas pokok yang merupakan fasilitas utama yang harus ada di Pelabuhan Perikanan, fasilitas fungsional untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional, dan fasilitas penunjang yang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan. Beberapa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang dapat masing masing dapat dilihat pada tabel dan berikut ini:

Tabel 2. Fasilitas Pokok di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
Areal Pelabuhan	(13, 21 ha)/132.122 m²	
Existing awal	(2,59 ha)/25.880 m ²	Perum
Reklamasi sayap timur	(1,27 ha)/12.744 m ²	PPNBr I (TA.2000)
Reklamasi sayap barat	(0,48 ha)/4.880 m ²	PPNBr I (TA.2000)
• Lanjutan reklamasi di lahan lama	(0,09 ha)/900 m ²	PPNBr I (TA.2003)
Reklamasi di lahan baru	(0 ,10 ha)/1.003 m ²	PPNBr II (TA.2004)
• Lanjutan reklamasi di lahan baru	(1,36 ha)/13.640 m ²	PPNBr II (TA.2005)
• Lanjutan reklamasi di lahan baru	(0,17 ha)/1.783 m ²	PPNBr II (TA.2007)
• Lanjutan reklamasi di lahan baru	(0,07 ha)/750 m ²	PPNBr II (TA.2008)
• Lanjutan reklamasi di lahan baru	(0,09 ha)/894 m ²	PPNBr II (TA.2008)
• Lanjutan reklamasi di lahan baru	(6,96 ha)/69.648 m ²	PPNBr II (TA.2009)

Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
Dermaga / jetty		
Dermaga Bongkar	525,5 m'	PPNBr I
Dermaga Bongkar (arah utara - selatan)	161 m'	PPNBr II (TA. 2009)
Dermaga Perbekalan (arah timur - barat)	(159,7 x 7) / 159,7 m ²	PPNBr II (TA.2009)
Kolam Pelabuhan	23,4 ha	PPNBr
Dilakukan pengerukan kolam pelabuhan di TA 2000, 2009, dan 2015		
Turap (Revetment)	4.359,9 m'	
	570,2 m'	PPNBr I (TA.2000)
Turap buis beton & pasangan batu	305 m'	PPNBr II (TA.2003)
Turap pasangan batu	258 m'	PPNBr II (TA.2004)
Turap batu kosong	1.520 m'	PPNBr II (TA.2005)
Turap batu kosong	235,1 m'	PPNBr II (TA.2007)
Turap sheet pile	144 m'	PPNBr II (TA.2008)
Turap sheet pile	173,65 m'	PPNBr II (TA.2009)
Turap sheet pile	447,95 m'	PPNBr II (TA.2009)
Turap buis beton	26,3 m'	PPNBr II (TA.2009)
Turap beton	244 m'	PPNBr II (TA.2015)
Tanggul	435,7 m'	PPNBr II (TA.2015)

Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
Jalan Kompleks	23.465,56 m²	
Jalan kompleks	1.500 m ²	PPNBr I (TA.1993)
Pengaspalan jalan : (636,5 x 8) m ²	5.092 m ²	PPNBr I (TA.2005)
Cor beton	108,66 m ²	PPNBr I (TA.2006)
Pengaspalan areal bongkar muat (40 x 18) m ²	720 m ²	PPNBr I (TA.2007)
Pengaspalan areal bongkar muat	347,5 m ²	PPNBr I (TA.2009)
Cor beton : (32,5 x 6) m ²	195 m ²	PPNBr I (TA.2011)
Cor beton : (35 x 5,5) m ²	192,5 m ²	PPNBr II (TA.2012)
Pengaspalan jalan (570 x 7) m ² + (80 x 16) m ²	5.270 m ²	PPNBr II (TA.2012)
Pengaspalan jalan (lanjutan) (90 x 8) m ² + (110 x 8) m ²	1.600 m ²	PPNBr II (TA.2013)
Peningkatan jalan kompleks (cor beton)	369,15 m ²	PPNBr I (TA.2014)
Pengaspalan jalan (lanjutan)	8.070,75 m ²	PPNBr II (TA.2014)
• Sta 150-225 (75m') : lebar 10-13 m'		
• Sta 225-300 (75 m') : lebar 16 m'		
• Sta 376-450 (74 m') : lebar 9-13,5m'		
• Sta 450-989 (539 m') : lebar 9 m'		

Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
Breakwater	292 m'	
Breakwater	97 m'	PPNBr II (TA.2005)
Breakwater (lanjutan)	195 m'	PPNBr II (TA.2006)
Breakwater	50 m' (barat) & 293m' (timur)	BBWS-PUPR (2021-2022)
Drainase	3.852,60 m'	
Drainase (existing awal)		PPNBr I (TA.1993)
Drainase	63 m'	PPNBr I (TA.1995)
Drainase	22 m'	PPNBr I (TA.1996)
Drainase (areal TPI lama sd sayap timur)	215,5 m'	PPNBr I (TA.2005)
• (Drainase terbuka : 160,5 m')		
• (Drainase tertutup : 55 m')		
Drainase (areal warung sd sayap timur)	244,7 m'	PPNBr I (TA.2006)
Drainase (sekitar TPI lama)	274,4 m'	PPNBr I (TA.2007)
Peningkatan Drainase (selatan bengkel) berupa gorong-gorong	6 m'	PPNBr I (TA.2011)
Drainase (Box culvert)	27 m'	PPNBr II (TA.2012)

Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
Drainase	868,8 m'	PPNBr II (TA.2013)
• (U gutter (1,2 x 0,8 x 1) : 635 buah)	762 m'	
• (Box culvert (1,2 x 1 x 1) : 89 buah)	106,8 m'	
Drainase	631,2 m'	PPNBr II (TA.2014)
• (U gutter (1,2 x 0,8 x 1) : 490 buah)	588 m'	
• (Box culvert (1,2 x 1 x 1) : 36 buah)	43,2 m'	
Drainase	1.636,8 m'	PPNBr II (TA.2021)
• (U gutter (1,2 x 0,4 x 0,4) : 1.364 buah)	588 m'	
• (Box culvert (1 x 0,4 x 0,4) : 26 buah)	26 m'	



Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Lahan baru)



Turap/ Breakwater



Dermaga bongkar



Jalan Kompleks



Rambu Navigasi

Gambar 4. Fasilitas Pokok Pelabuhan

Tabel 3. Fasilitas Fungsional di PPN Brondong

No	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
1	Gedung TPI	1. 080 m ²	Perum
2	Gudang Keranjang	100 m ²	Perum
3	Shelter Nelayan	100 m ²	Perum
4	Tangki air & instalasi	170 m ²	Perum
5	Tangki BBM	150 & 25 ton	Perum
6	SPDN di lahan lama (timur)		Perum
7	SPDN di lahan baru (barat)	kapasitas 248 KL/bln	Perum
8	Listrik dan instalasi	345 KVA	Perum
9	Genset dan instalasi	170 KVA	Perum
10	Tmp. Penjualan BBM	36 m ²	Perum
11	Bengkel	120 m ²	Perum
12	Kantor Perum	480 m ²	Perum
13	Pabrik Es Balok	50 ton/ hr x 2 unit	Perum
14	Pabrik Es Balok	50 ton/ hr	Pemda
15	Pabrik Es Curai	-	Perum
	Alih fungsi menjadi Gudang dan Cruiser		

No	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
20	BPN (lama)	125 m ²	PPNBr I (TA.1885)
21	Balai Pertemuan Nelayan	(19 x 16) m ² / 304 m ²	PPNBr II (TA.2015)
22	Pos Masuk	25 m ²	PPNBr I (TA.2005)
23	Kantor Pelabuhan (lama)	348 m ²	PPNBr I (TA.2001)
24	Gedung Pelayanan Terpadu	(34 x 16) m ² x 2 lantai / 1.088 m ²	PPNBr II (TA.2015)
25	Los Pengepakan Ikan	480 m ²	PPNBr I (TA.2004)
26	Los Pem. Kep. Ikan	300 m ²	PPNBr I (TA.2003)
	· Alih fungsi menjadi Outlet Pengepakan ikan		
27	Reefer Container (Kondisi rusak)	1 unit	PPNBr I (TA.2003)
28	Pabrik Es Mini (Kondisi rusak)	3 ton/hr	PPNBr I (TA.2006)
29	Kantor Syahbandar	63, 25 m ²	PPNBr I (TA.2008)
30	Bengkel Pelabuhan	27, 6 m ²	PPNBr I (TA.2009)
31	Gedung PPDI		
	• Hall Utama	2.976 m ²	PPNBr II (TA.2010)
	• Ruang Sortir Ikan	744 m ²	PPNBr II (TA. 2010)
	• Kantor Administratur	96 m ²	PPNBr II (TA. 2010)
	• MCK di luar gedung		PPNBr II (TA. 2011)
	• IPAL	120 m ³ / hari	PPNBr II (TA. 2011)
	• Gudang peralatan	180 m ²	PPNBr II (TA. 2011)

No	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
32	Tandon Air Laut		
	• Tandon Atas	22,5 m3	PPNBr II (TA. 2010)
	• Tandon Bawah	270,11 m3	PPNBr II (TA. 2010)
33	Tandon Air Tawar		
	• Tandon Atas	22,5 m3	PPNBr II (TA. 2011)
	• Tandon Bawah	693,42 m 3	PPNBr II (TA. 2011)
34	Instalasi Listrik		
	• Gardu listrik / Travo	30,4 m2 / 250 KVA	PPNBr II (TA. 2011)
	• Gardu dan Inst. Listrik	240 KVA	PPNBr II (TA. 2020)
	• Gardu dan Inst. Listrik	164 KVA	PPNBr II (TA. 2020)
	• Daya listrik	240 KVA	PPNBr II (TA. 2011)
	• Tiang beton	27 buah	PPNBr II (TA. 2012)
	• Lampu PJU 250 watt	50 buah	PPNBr II (TA. 2012)
35	Cold storage		
	• Cold Storage	400 ton	PPNBr II (TA. 2020)
	• ABF	8 ton	PPNBr II (TA. 2020)
36	Cold Storage		
	• Cold Storage	50 ton x 2 unit	PPNBr II (TA. 2020)
	• ABF	3 ton x 2 unit	PPNBr II (TA. 2020)

No	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
37	Outlet Pengepakan Ikan	30 m ² x 8 Unit	PPNBr II (TA. 2016)
38	Outlet Pengepakan Ikan	(5 x 6) m ² / 30 m ² x 13 Unit	PPNBr II (TA.2014)
39	Outlet Pengepakan Ikan	(5 x 6) m ² / 30 m ² x 10 Unit	PPNBr II (TA.2015)
40	Kios	(5 x 6) m ² / 30 m ² x 10 Unit	PPNBr II (TA. 2015)
41	Parkir Sepeda Motor		
	• Parkir Sepeda Motor	198 m ²	PPNBr II (TA.2014)
	• Belakang Bengkel	1.022 m ²	PPNBr II (TA.2021 dan 2023)
42	Parkir Mobil dan Motor	214,52 m ²	PPNBr II (TA. 2015)
	• Mobil dan Motor	(16 x 6,25) m ²	
	• Single Motor	(15 x 2,6) m ²	
	• Double Motor	(16 x 4,72) m ²	
43	Pintu Gerbang/Gapura	33,6 m ²	PPNBr II (TA.2014)
44	SWRO		
	• Bangunan	171,7 m ²	PPNBr II (TA. 2014)
	• Output debit Air	200 m ³ / 24 jam	
45	PJU Solar Cell	85 unit	PPNBr II (TA.2014)



No	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
46	Pematangan Lahan dan Paving	9.140,31 m ²	PPNBr II (TA. 2015)
	• Paving rongga (area upacara)	391,72 m ²	
	• Area 1 (area perkantoran)	2.574,45 m ²	
	• Area 2 (depan PPDl)	4.226,16 m ²	
	• Area 3 (area kios/outlet)	1.947,98 m ²	
47	Rumah Genset	(4 x 4) m ² / 16 m ²	PPNBr II (TA. 2015)
48	Garasi Alat Berat dan Gudang Peralatan	(16 x 10) m ² / 160 m ²	PPNBr II (TA. 2015)
49	Ruang Laboratorium	(10 x 8) m ² / 80 m ²	PPNBr II (TA. 2015)
50	Gedung Bengkel	8x12 m ²	PPNBr II (TA. 2018)
51	Penjemuran Jaring	524 m ²	PPNBr II (TA. 2023)
52	Rambu Navigasi		
	• Rambu Suar di darat	2 unit	PPNBr I (TA.1993)
	• SBNP di laut	2 unit	PPNBr (TA.2011)

KET: PPNBr I (Di Lahan Lama) PPNBr II (Di Lahan Baru)



Kantor Utama/Gedung Pelayanan Terpadu



Gerbang Masuk Pelabuhan



Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI)



Bengkel Nelayan



Cold Storage



Kios dan Outlet Pengepakan Ikan



Balai Pertermuan Nelayan



Garasi Alat Berat



Ruang Laboratorium

Gambar 5. Fasilitas Fungsional

Tabel 4. Fasilitas Penunjang di PPN Brondong

No	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
1	Tempat Ibadah (lama)	100 m ²	PPNBr I (TA.2008)
2	Masjid / Mushola (dimensi 19,5 x 16 m ²)	300,9 m ²	PPNBr II (TA. 2015)
3	Pagar Keliling (lama)	380 m'	PPNBr I
4	Pagar Keliling	356,85 m'	PPNBr II (TA. 2015)
	• Tipe 1	234,15 m'	
	• Tipe 2	122,7 m'	
5	Rumah Dinas		
	• Leader House (10 x 10) m ²	100 m ²	PPNBr II (TA. 2015)
	• Mess Operator (5, 5 x 9) m ²	49, 5 m ²	PPNBr II (TA. 2022)
	• Mess Operator (5, 5 x 9) m ²	49, 5 m ²	PPNBr II (TA. 2025)
6	Landscape & Papan Nama Pelabuhan	(9,3 x 2) m ² / 18,6 m ² / 1 Unit	PPNBr II (TA. 2015)
7	Pagar IPAL	76,6 m'	PPNBr II (TA.2014)
8	Mess Operator	250 m'	Perum
9	MCK	60 m ²	PPNBr I (TA.2003, 2006)
10	Rumah Kalabuh	120 m'	Perum
11	Rumah Dinas	170 m'	Perum

No	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
12	Kios/Warung	250 m ²	Perum
13	Pos Satpam	6 m ²	PPNBr I (TA.1982)
14	Pos Jaga (lama)	24 m ²	PPNBr II (TA. 2010)
15	Pos Jaga	(3 x 2) m ² x 2 unit / 12 m ²	PPNBr II (TA.2015)
16	Pagar BRC		PPNBr II (TA. 2022)
	• Utara	77 m'	
	• Selatan	103 m'	

KET: PPNBr I (Di Lahan Lama) PPNBr II (Di Lahan Baru)



Rumah Dinas Pimpinan/Leader House



Mess Operator



Masjid

Gambar 6. Fasilitas Penunjang

G. Permasalahan dan Tantangan

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan mempunyai permasalahan yang kompleks karena keterkaitan dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di PPN Brondong yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat dibidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan.

Dalam pembangunan perikanan tangkap dengan konsep blue economy dengan mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya ikan dengan aspek ekologi melalui keberlanjutan atau kelestarian lingkungan. PPN Brondong sebagai UPT dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tantangan dalam mewujudkan terlaksananya Penangkapan ikan terukur, Pemungutan PNBP pasca produksi, Pemberdayaan Nelayan, Pembangunan Pelabuhan Perikanan, dan Penguatan tugas dan fungsi.

Dalam pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), PPN Brondong berada pada WPP 712 masuk dalam kategori pengelolaan non kuota yang ditujukan untuk nelayan tradisional dan pada WPP 712 dan 713 untuk kategori kapal pasca produksi. Permasalahan yang dihadapi antara lain: (a) masih terdapat nelayan yang melaut melebihi 12 mil dengan izin dari daerah provinsi. (b) masih terdapat nelayan yang belum beralih alat tangkap dari alat tangkap yang dilarang yaitu (cantrang) menjadi alat tangkap yang diperbolehkan yaitu jaring tarik berkantong.

Pungutan PNBP pasca produksi pada kapal perikanan bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap nelayan dalam kontribusi pemanfaatan sumberdaya ikan. Permasalahan yang dihadapi antara lain: (a) masih terdapat Kapal yang beraktivitas di PPN Brondong yang belum memiliki dokumen penangkapan ikan yang resmi, (d) kurang optimalnya kesadaran nelayan untuk melapor kedatangan kapalnya, dan (e) terdapatnya pangkalan pendaratan ikan yang tersebar di PPN Brondong yang membutuhkan monitoring dan pengawasan lebih ketat.

Permasalahan dalam pemberdayaan nelayan antara lain (a) kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya syarat laik laut, laik simpan dan laik tangkap setiap mau berangkat melakukan kegiatan penangkapan ikan masih kurang (b) belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan, dan (c) terbatasnya kompetensi dan pengetahuan awak kapal perikanan.

Pelabuhan Perikanan yang bersih, sehat dan indah merupakan konsep pembangunan pelabuhan sehingga membawa dampak positif, tetapi untuk mewujudkannya terdapat permasalahan antara lain: (a) terbatasnya fasilitas pelabuhan dalam menunjang aktivitas kapal perikanan seperti dermaga bongkar, dermaga muat dan kolam pelabuhan yang terpengaruh kondisi pasang surut, (b) masih tingginya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, (c) rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan terutama sampah plastik, dan (d) masih ada kapal-kapal yang sudah lama tidak beroperasi berlabuh di kolam pelabuhan.

Dalam menjalankan peranannya, PPN Brondong harus melakukan penguatan tugas dan fungsi kepada publik dengan sasaran yang tepat. Permasalahan dalam penguatan tugas dan fungsi yaitu terbatasnya kompetensi SDM sehingga memerlukan sosialisasi, pelatihan ataupun bimbingan teknis SDM di PPN Brondong.

H. Kondisi Terkini dan Rencana Kedepan

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepatuhan hukum, tahun ini dilakukan optimalisasi perizinan kapal di PPN Brondong. Upaya ini difokuskan pada percepatan penyelesaian dokumen perizinan seperti SIUP hingga SIPI. Koordinasi aktif antara pemilik kapal, Rukun Nelayan, dan instansi terkait telah dilakukan sehingga hambatan administratif seperti Grosse Akta dan kelengkapan data teknis kapal dapat diselesaikan. Dengan optimalisasi perizinan, seluruh kapal yang beroperasi telah memenuhi ketentuan hukum sehingga tercipta kepastian usaha, peningkatan PNPB, serta pengawasan yang lebih efektif. Kegiatan ini memberikan hasil yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 jumlah kapal berizin lengkap yaitu 22 kapal sedangkan di tahun ini meningkat menjadi 181 kapal yang berizin lengkap.

Pelayanan Persetujuan Berlayar (PB) juga telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Proses verifikasi dokumen kapal, pemeriksaan kelengkapan awak kapal, pemeriksaan teknis dan nautis, serta pemenuhan kewajiban administrasi dilakukan sebelum penerbitan persetujuan keberangkatan. Dengan sistem pelayanan yang semakin tertib dan terintegrasi, proses penerbitan PB dapat berjalan lebih cepat tanpa mengurangi aspek pengawasan keselamatan pelayaran.

Penerbitan STBLK (Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal) telah diterapkan sebagai bagian dari mekanisme wajib pelaporan kedatangan kapal. Di PPN Brondong, penerbitan STBLKK (Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal) dilaksanakan setelah kapal menyelesaikan kegiatan bongkar muat hasil tangkapan. Setelah proses bongkar selesai, petugas melakukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesesuaian kegiatan kapal, kemudian STBLKK diterbitkan sebagai bukti resmi bahwa kapal telah melaporkan kedatangan dan melaksanakan aktivitasnya sesuai ketentuan.

Optimalisasi pembongkaran ikan juga telah berjalan melalui penataan zonasi dermaga dan pengaturan posisi sandar kapal sesuai klasifikasi dan kelengkapan perizinannya. Pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat dilakukan secara konsisten guna menjaga kelancaran arus distribusi hasil tangkapan dan memaksimalkan kapasitas pelayanan pelabuhan. Penataan ini berdampak pada tertibnya aktivitas di dermaga dan mendukung stabilitas harga ikan dan kelancaran distribusi hasil perikanan.

Selain itu, optimalisasi pelaporan kedatangan kapal telah dilaksanakan melalui penguatan sosialisasi dan penerapan SOP yang lebih tegas kepada seluruh pengguna jasa. Kapal yang tiba diwajibkan segera melapor di pos kedatangan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Proses diawali dengan penerimaan rencana kedatangan kapal melalui WA Group yang tersedia, Selanjutnya, petugas menerima dan memeriksa dokumen kapal dan memberikan bendera bongkar. Dilanjutkan dengan pengarahannya lokasi tambat oleh petugas kesyahbandaran. Dengan pelaksanaan yang konsisten, sistem pelaporan ini mampu mendukung pengelolaan lalu lintas kapal yang lebih tertib dan transparan.

Untuk memastikan optimalnya tambat labuh serta ketertiban tata kolam, akan dibangun dashboard sistem informasi yang memantau secara real-time kondisi kolam. Dimana kolam akan dibagi menjadi beberapa area dan pada sistem informasi tersebut menyajikan informasi data jumlah kapal dan profil kapal yang berada di kolam berdasarkan area.

BAB II. Kinerja Pengelolaan PPN Brondong

A. Kinerja PPN Brondong

1. Nilai PNBP

Pelaksanaan fungsi perusahaan dalam memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di PPN Brondong pada tahun 2025 dilakukan berdasarkan PP 85 Tahun 2021 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian Penerimaan PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2025 sebesar **Rp. 2.885.707.804 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus empat rupiah)** dengan target Rp. 2.210.420.000 (Dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga realisasinya mencapai 130,55 % yang terdiri dari :



Pendapatan dari
Penjualan Peralatan
dan Mesin (425122)

Rp. 34.463.328



Pendapatan Sewa
Tanah, Gedung, dan
Bangunan (425131)

Rp. 400.518.244



Penggunaan sarana
dan prasarana sesuai
dengan tusi (425151)

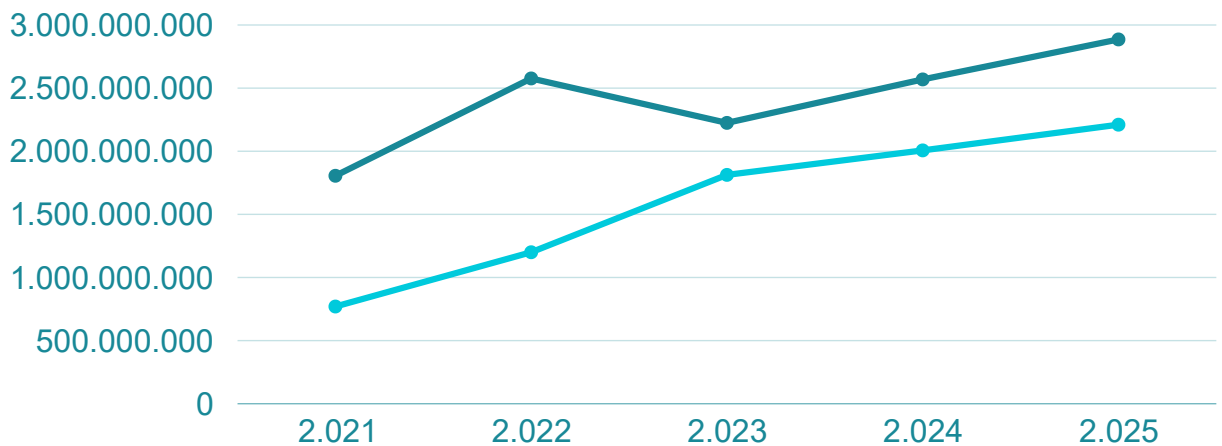
Rp. 605.010.635



Pendapatan dari
Penjualan Peralatan
dan Mesin (425122)

Rp. 1.845.715.597

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 pencapaian PNBP sebesar Rp. 2.568.966.845 (Dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga pada tahun 2025 PNBP mengalami peningkatan sebesar 12,33%. Tren nilai PNBP di PPN Brondong selama periode 2021 – 2025 rata-rata memiliki tren positif/meningkat, terlihat pada grafik di gambar 7 berikut ini.



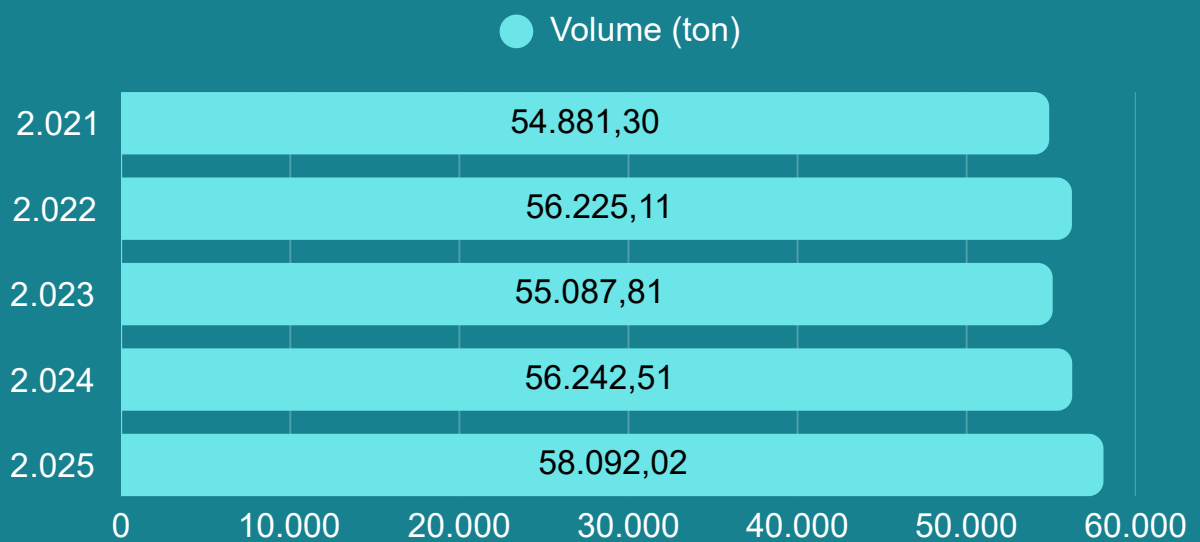
Gambar 7. Grafik Tren Nilai PNBP di PPN Brondong

2. Produktivitas Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan jumlah hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPN Brondong yang berasal dari kapal penangkapan ikan. Perkembangan jumlah produksi perikanan di daerah Brondong mengalami sedikit fluktuasi. Perubahan ini disebabkan oleh berkembangnya sarana peningkatan baik berupa perahu maupun alat tangkap, sehingga menunjang peningkatan produksi perikanan. Hasil tangkapan nelayan tiap bulan memiliki jumlah spesies yang berbeda, karena ada beberapa ikan yang tertangkap tidak berdasarkan musim dan dipengaruhi oleh daerah penangkapan.

Hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat secara moderat dengan fluktuasi tahunan yang relatif terkendali. Pada tahun 2021 volume produksi tercatat sekitar 54.881, kemudian meningkat pada 2022 menjadi sekitar 56.225.

Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi kurang lebih 55.088 sebelum kembali meningkat pada 2024 sebesar 56.243 dan mencapai titik tertinggi pada 2025 dengan volume sekitar 58.092. Pola ini mencerminkan adanya tren positif jangka menengah, di mana peningkatan total produksi selama lima tahun mencapai lebih dari tiga ribu satuan, sekaligus menunjukkan stabilitas operasional pelabuhan dalam menampung dan mencatat hasil tangkapan nelayan. Fluktuasi yang tidak terlalu tajam mengindikasikan bahwa aktivitas penangkapan dan bongkar muat di PPN Brondong berlangsung relatif konsisten tanpa gangguan ekstrem yang signifikan seperti yang terlihat pada gambar 8 berikut ini.



Gambar 8. Grafik Tren Produksi Perikanan Tangkap di PPN Brondong

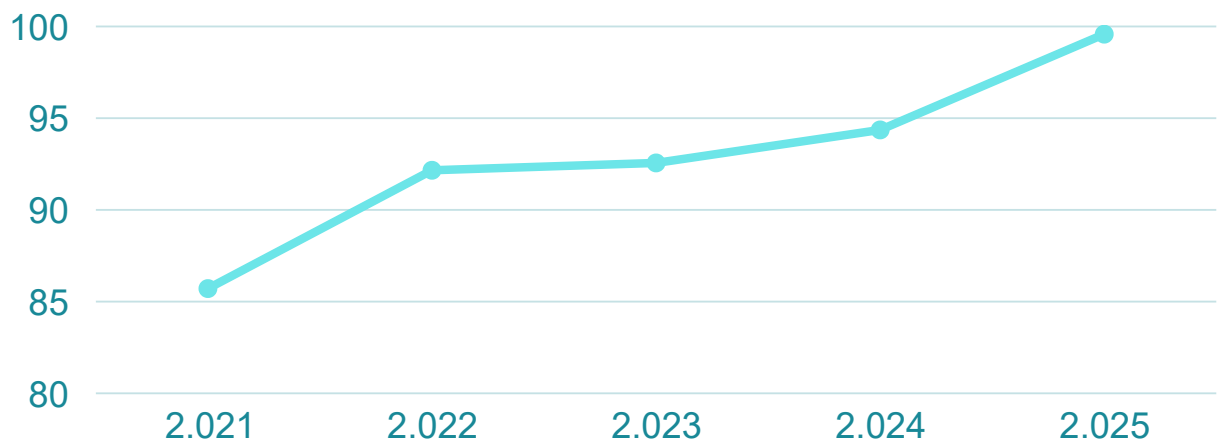
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

a. Permohonan Pengusahaan

Fungsi pengusahaan, pelabuhan sebagai pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, bongkar muat ikan, pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, serta logistik dan perbekalan kapal pemasaran dan distribusi ikan, pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan, penyediaan jasa kelautan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 terdapat sebanyak 128 permohonan dengan hasil analisa atau evaluasi sebanyak 128 permohonan telah sesuai dan dapat diproses lebih lanjut sedangkan sebanyak 6 permohonan tidak sesuai. Dalam pelaksanaan pelayanan sewa lahan/gedung/bangunan di PPN Brondong telah terstandarisasi melalui ISO 19001:2015

b. Tingkat Kinerja Pelabuhan

Tingkat kinerja Pelabuhan merupakan indikator kinerja operasional pelabuhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupa nilai evaluasi dan kinerja Pelabuhan perikanan yang mencakup Operasional pelabuhan perikanan berupa penyediaan data operasional pelabuhan, pelayanan kesyahbandaran, pelayanan usaha pelabuhan perikanan, pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dan pemenuhan dokumen operasional. Pada Tahun 2025 ini capaian tingkat kinerja pelabuhan perikanan sebesar 99,58% kategori ISTIMEWA dengan target sebesar 87 maka capaiannya sebesar 114,46 %. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 94,36, maka terjadi kenaikan sebesar 5,54 %. Tren capaian tingkat kinerja pelabuhan perikanan di PPN Brondong selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini di gambar 9.

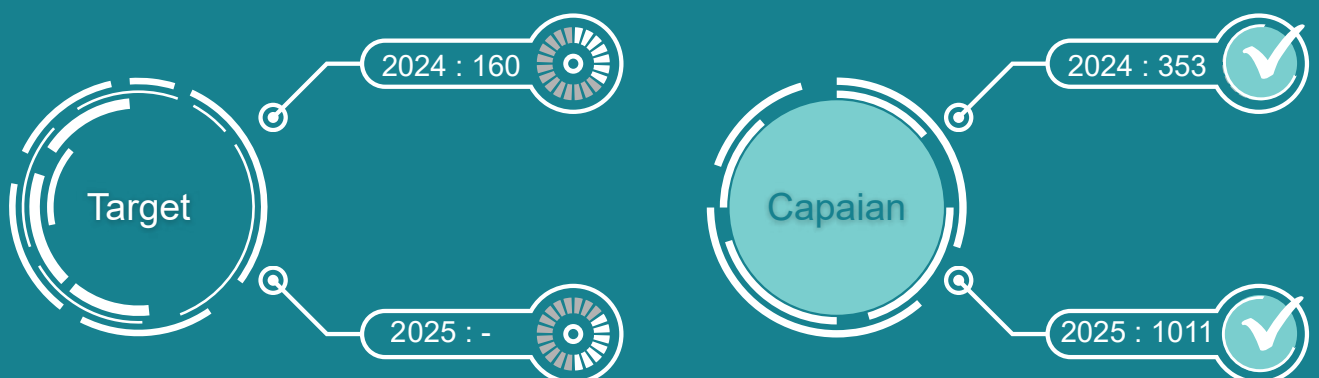


Gambar 9. Grafik Tren Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan di PPN Brondong

c. Pelayanan Kesyahbandaran

Logbook Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan. Kegunaan Logbook penangkapan ikan sebagai informasi hasil tangkapan ikan dalam sistem manajemen penangkapan ikan. Kewajiban logbook penangkapan ikan pada setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di seluruh WPP-NRI. Mengacu pada permen KP nomor 33 Tahun 2021 perihal Log Book Penangkapan ikan untuk kapal perikanan < 5 GT menggunakan lembar log book penangkapan ikan yang disederhanakan dan diatas 5 GT diharuskan menggunakan E-Logbook Penangkapan Ikan berbasis aplikasi yang dapat di download di Playstore dan melakukan aktivasi di Pelabuhan Perikanan. Pada tahun 2025 pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi data logbook penangkapan ikan telah mencapai sebesar 1011 laporan.

Pada tahun 2025 capaian mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2023 target laporan dari 160 laporan capaian sebesar 353 laporan. Matriks perbandingan target dan capaian dapat dilihat pada Gambar 10 :



Gambar 10. Target Capaian Logbook Penangkapan Ikan Tahun 2025

4. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Peningkatan dan pengoptimalan fasilitas merupakan komitmen Pelabuhan sebagai Unit Pelayanan Teknis dalam memberikan pelayanan prima kepada setiap pengguna jasa di Kawasan Pelabuhan, oleh sebab itu dalam tahun anggaran 2025 terlihat sangat nyata optimalisasi pengembangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan dengan menyerap anggaran sebesar Rp.224.902.000,- dan uraian pengembangannya dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 5. Rekapitulasi Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2021	3	3	1. Pemasangan Paving Block 2. Rehabilitasi Pos Pas Masuk 3. Pembuatan Drainase Pelabuhan
2022	7	6	1. Pembangunan Mess Operator 2. Rehabilitasi PJU Utara 3. Pembangunan Pagar BRC Utara 4. Pembangunan Pagar BRC Selatan 5. Rehabilitasi Selasar Dermaga 6. Rehabilitasi Gedung Arsip
2023	7	4	1. Rehabilitasi Parkir Motor 2. Rehabilitasi Akses Bongkar Muat 3. Rehabilitasi Menara Suar 4. Pembangunan Perbaikan Jaring
2024	3	3	1. Pengadaan Jaringan air khusus area kantor Pelabuhan (Jaringan niaga) 2. Perbaikan jalan di L8. 3. Pembangunan Mess Operator
2025	2	2	1. Rehabilitas Gedung Pelayanan 2. Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah

Kondisi pelabuhan selama 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat namun terdapat penurunan realisasi pengembangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan di Tahun 2023 dari target 7 dapat tercapai realisasi 4, hal ini dikarenakan terdapat pemotongan anggaran dari Kemenkeu untuk RKA/KL PPN Brondong.



Gambar 11. Rehabilitasi Gedung Pelayanan



Gambar 12. Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah

5. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) dengan menggelar gerai pelayanan di setiap daerah. Akselerasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. KKP sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan prima diwujudkan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.578/MEN-KP/ VII/2022 tentang Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Dalam Masa Transisi, kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan dengan pengalihan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Sertifikat Keselamatan Barang dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

PPN Brondong sebagai salah satu UPT pelaksana kebijakan pada Tahun 2025 telah menerbitkan sebanyak 816 dokumen SKKP dengan target sebanyak 618 dokumen atau 132,03 %. Dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 143,66 % dengan realisasi tahun 2024 sebanyak 568 dokumen.

6. Tata Kelola Pemerintahan di Pelabuhan Perikanan

Realiasi PM ZI di PPN Brondong pada tahun 2025 yaitu 86,16 dengan target nilai PM pembangunan ZI di PPN Brondong sebesar 75,5 atau mencapai 114,12% dari target. Dibandingkan dengan realisasi periode 2024, maka pada tahun 2025 realisasi IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan” mengalami kenaikan sebesar 1,69 atau 2%.



Pengawasan intern di Pelabuhan dilakukan oleh intern Inspektorat Jenderal berupa rekomendasi-rekomendasi dan harus dilakukan tindak lanjut. Pemanfaatan untuk perbaikan dari rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 adalah 100% telah dilakukan tindak lanjut perbaikan. Capaian realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Brondong adalah 100% atau 117,65% dari target 85%. Dibandingkan capaian periode sebelumnya maka capaian Tahun 2025 adalah sama yaitu 100%. Indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan periode jangka menengah karena mulai dilakukan perhitungan sejak Tahun 2022 dengan hasil seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perbaikan kinerja organisasi.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). capaian Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 89,20 atau 101,36% dari target sebesar 88.

Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai IP ASN PPN Brondong pada tahun 2025 adalah 91,67 atau lebih besar dari target sebesar 87 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 105,37%.

Dibandingkan dengan realisasi periode 2024, maka pada tahun 2025 realisasi IKU “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” mengalami penurunan sebesar 1,58 atau 1,7 %.

Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi (1) kualitas perencanaan anggaran, (2) kualitas pelaksanaan anggaran, dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Jumlah indikator kinerja yang dilakukan pengukuran dalam IKPA sebanyak 8 (delapan) yaitu (1) revisi DIPA, (2) Deviasi halaman III DIPA, (3) data kontrak, (4) penyelesaian tagihan, (5) pengelolaan UP dan TUP, (6) dispensasi SPM, (7) penyerapan anggaran, dan (8) capaian output. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Nilai IKPA pada tahun 2025 adalah sebanyak 95,41 atau lebih besar dari target sebesar 92 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 103,71%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2024, maka pada tahun 2025 realisasi IK “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” mengalami penurunan sebesar 4,21 atau 4,2% dengan realiasi nilai IKPA tahun 2024 adalah 99,62.

Nilai kinerja perencanaan anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar 90,50 atau lebih besar dari target sebesar 71,5 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 126,57%. Sedangkan indeks untuk nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 sebesar 92,66 atau 104,70% dari target yang ditetapkan sebesar 88,5. Dibandingkan capaian tahun 2024, maka terjadi penurunan sebesar 0,19 atau 0,20%.

B. Capaian Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan di PPN Brondong 2025

1. Frekuensi Pengiriman Data PIPP

Frekuensi pengiriman data ke aplikasi PIPP dilakukan dengan melakukan pengolaan data setiap hari. Pusat informasi pelabuhan perikanan merupakan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan perikanan. Peran PIPP dalam informasi antara lain: sebagai penguatan data dan informasi di Pelabuhan Perikanan agar mampu berperan strategis dalam mendukung program pengelolaan SDI dan pengendalian usaha perikanan tangkap, sebagai sumber informasi perikanan tangkap yang handal bagi pemerintah, peneliti, pelaku usaha dan mahasiswa, data yang dapat diketahui dengan sarana PIPP oleh masyarakat luas seperti data jumlah nelayan dan tenaga kerja, potensi pemanfaatan lahan, jumlah dan harga ikan yang dibongkar, pelayanan dan fasilitas di pelabuhan perikanan.

Hasil dari analisis data PIPP digunakan untuk menilai kinerja operasional pelabuhan perikanan data evaluasi kinerja Pelabuhan perbulan dan pertahun. Analisis PIPP juga dapat berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan perencanaan untuk meningkatkan operasional pelabuhan perikanan, penelitian dan membuka peluang investasi dipelabuhan perikanan.

Pengiriman data PIPP yang dilakukan oleh operator dengan jumlah hari entry data pada aplikasi PIPP. Data yang di entri antara lain: (a) data keberangkatan kapal, (b) data kedatangan kapal, dan (c) data produksi dan harga ikan, selain itu terdapat data yang bersifat bulanan dan tahunan yang situasional. Jumlah hari entry PIPP pada tahun 2025 sebanyak 359 hari dari 365 hari (98,4%). Dibandingkan jumlah hari entri pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 4 hari atau 1,1 %, dimana jumlah hari entri PIPP pada tahun 2023 sebanyak 355 hari (97,3%). Frekuensi entri PIPP perbulan dapat dilihat pada Tabel 9 dan gambar 12 berikut ini.

Tabel 6. Frekuensi Entry PIPP per Bulan

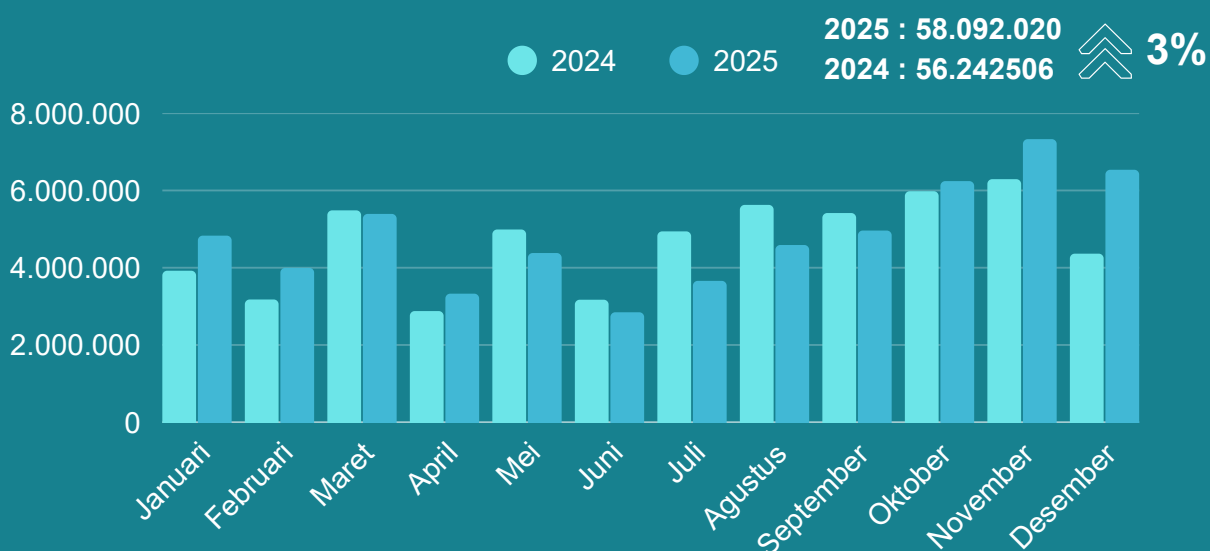
No.	Bulan	Frekuensi Entry PIPP (Hari)		+/--(%)
		2024	2025	
1	Januari	30	31	3,30%
2	Februari	28	28	0,00%
3	Maret	30	29	-3,30%
4	April	25	28	12,00%
5	Mei	31	31	0,00%
6	Juni	28	29	3,60%
7	Juli	31	31	0,00%
8	Agustus	30	30	0,00%
9	September	30	30	0,00%
10	Oktober	31	31	0,00%
11	November	30	30	0,00%
12	Desember	31	31	0,00%
Total		355	359	1,10%



Gambar 13. Dokumentasi Petugas Entry PIPP di PPN Brondong

2. Produksi Perikanan

Frekuensi pengiriman data ke aplikasi PIPP dilakukan dengan melakukan pengolahan data setiap hari. Pusat informasi pelabuhan perikanan merupakan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan perikanan. Peran PIPP dalam informasi antara lain: sebagai penguatan data dan informasi di Pelabuhan Perikanan agar mampu berperan strategis dalam mendukung program pengelolaan SDI dan pengendalian usaha perikanan tangkap, sebagai sumber informasi perikanan tangkap yang handal bagi pemerintah, peneliti, pelaku usaha dan mahasiswa, data yang dapat diketahui dengan sarana PIPP oleh masyarakat luas seperti data jumlah nelayan dan tenaga kerja, potensi pemanfaatan lahan, jumlah dan harga ikan yang dibongkar, pelayanan dan fasilitas di pelabuhan perikanan.



Gambar 14. Produksi Ikan PPN Brondong per Bulan Tahun 2024-2025

Berdasarkan gambar diatas bahwa pada tahun 2025 terjadi kenaikan pada produksi ikan yaitu 58.092.020 kg atau 3 % di bandingkan dengan volume produksi ikan tahun 2024 yaitu 56.242.506 kg. Pada tahun 2025, jenis ikan yang didaratkan sebanyak 36 jenis ikan. Ikan dominan yang didaratkan adalah jenis Kurisi (28,80 %), Swanggi (24,76 %), Kuniran (12,79 %), Cumi-cumi (5,75 %), Ikan Ayam-ayam sebesar (3,01 %), dan sisanya jenis ikan lainnya. Berikut ini merupakan gambaran proses pembongkaran ikan di PPN Brondong mulai dari proses pembongkaran ikan dari palka kapal dan penyortiran ikan berdasarkan jenisnya kemudian dilakukan penimbangan ikan.



Gambar 15. Dokumentasi Aktivitas Pembongkaran, Penyortiran Ikan di PPN Brondong

3. Nilai Produksi Perikanan

Nilai produksi ikan mengalami perubahan setiap tahunnya terdapat banyak faktor yang dapat mengubah naik turunnya nilai produksi perikanan di PPN Brondong. Ada kalanya nilai produksi yang diperoleh tidak sebanding dengan naik turunnya jumlah produksi. Hal ini dikarenakan kenaikan nilai produksi ikan bukan hanya bergantung dari jumlah produksi ikan yang didaratkan, tetapi juga disebabkan oleh jenis ikan yang tertangkap dan harga pasar terhadap beberapa jenis ikan yang berlaku saat itu.

Nilai produksi perikanan di PPN Brondong diperoleh dari perkalian harga ikan dengan volume produksi ikan. Nilai produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan dinamika yang lebih fluktuatif dibandingkan dengan tren volume produksi lima tahunan sebelumnya yang cenderung meningkat secara moderat.

Secara agregat, total nilai produksi pada 2025 tercatat meningkat sekitar 4% dibandingkan 2024, dari sekitar Rp1,046 triliun menjadi Rp1,090 triliun. Kenaikan nilai tahunan ini sejalan dengan peningkatan volume produksi pada 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam analisis sebelumnya, namun distribusi kenaikan tersebut tidak merata sepanjang tahun dan mengindikasikan peran signifikan faktor harga ikan selain faktor kuantitas.

Pada awal tahun 2025, nilai produksi bulan Januari mengalami penurunan cukup tajam sebesar sekitar 9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun secara struktural volume tahunan menunjukkan tren naik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada awal tahun terjadi tekanan nilai ikan di tingkat pelabuhan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pasokan relatif tinggi pasca musim puncak (diakhir tahun sebelumnya). Berikut ini tabel data perbandingan nilai produksi ikan per bulan dari tahun 2024 dan 2025.

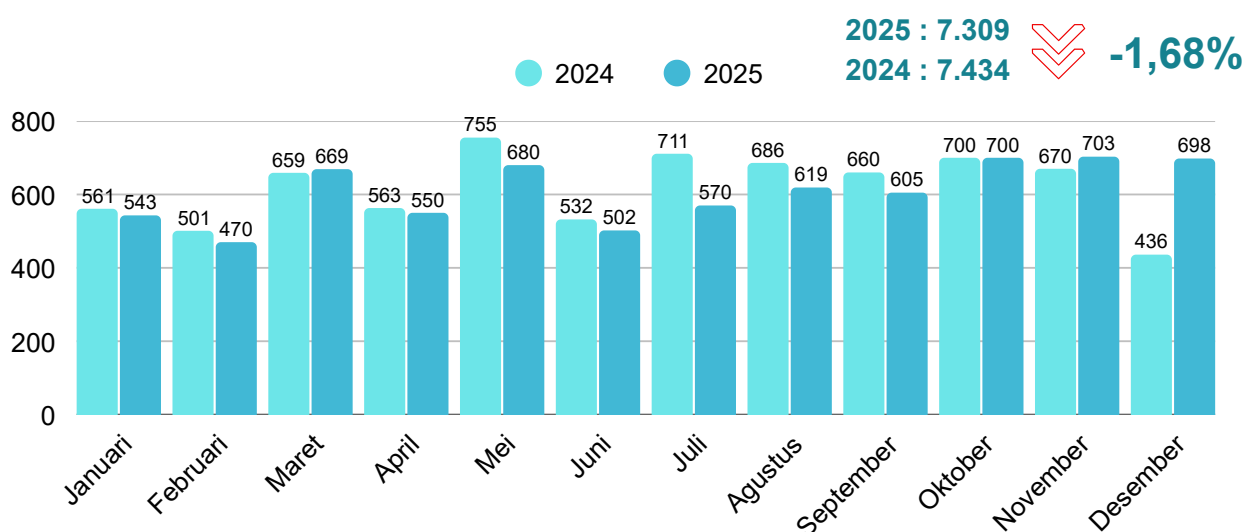
Tabel 7. Produksi Ikan PPN Brondong per Bulan Tahun 2024-2025

No.	Bulan	Nilai Produksi (Rp)		+/- (%)
		2024	2025	
1	Januari	85.168.224.000	77.469.764.000	-9%
2	Februari	65.886.906.500	66.957.278.500	2%
3	Maret	92.959.335.800	88.932.913.500	-4%
4	April	47.301.303.620	58.910.796.500	25%
5	Mei	71.463.104.000	75.454.894.000	6%
6	Juni	46.772.644.680	50.014.857.000	7%
7	Juli	92.841.046.833	69.383.694.000	-25%
8	Agustus	108.008.893.800	97.384.693.000	-10%
9	September	102.026.550.634	112.309.636.500	10%
10	Oktober	122.246.338.500	128.237.587.500	5%
11	November	130.409.859.100	143.741.824.000	10%
12	Desember	81.514.672.000	121.549.594.500	49%
Total		1.046.598.879.467	1.090.347.533.000	4%

4. Frekuensi Kunjungan

Frekuensi kunjungan kapal perikanan di PPN Brondong dapat dinilai dari aktivitas kapal masuk ke PPN Brondong untuk melakukan pembongkaran ikan. Kapal yang melakukan kunjungan di PPN Brondong bukan hanya kapal perikanan saja, melainkan kapal pengangkut. Kapal pengangkut ini berfungsi mengangkut hasil tangkapan dari kapal penangkap untuk didistribusikan atau di daratkan pada pelabuhan tujuan. Frekuensi jumlah kunjungan kapal ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator besarnya tingkat operasional pelabuhan tersebut.

Pada tahun 2025 terjadi penurunan angka frekuensi kunjungan kapal perikanan sebesar -1,68 % jika di bandingkan dengan angka frekuensi kunjungan kapal pada tahun 2023. Berdasarkan data distribusi alat tangkap, total seluruh alat tangkap yang digunakan kapal berjumlah 7.309 unit, dengan komposisi yang sangat didominasi oleh cantrang sebanyak 4.600 unit atau sekitar 63,0% dari total. Alat tangkap terbanyak kedua adalah rawai sebanyak 2.121 unit (29,0%), disusul pancing ulur sebanyak 570 unit (7,8%). Sementara itu, alat tangkap lainnya memiliki proporsi yang sangat kecil, yaitu pengangkut 6 unit (0,08%), purse seine 9 unit (0,12%), dan gill net 3 unit (0,04%). Struktur ini menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan ikan di pelabuhan sangat terkonsentrasi pada cantrang dan rawai, yang secara kumulatif mencakup lebih dari 90% total alat tangkap, sedangkan alat tangkap lain berperan sangat terbatas dan bersifat pelengkap dalam sistem perikanan tangkap yang ada. Perkembangan jumlah kunjungan kapal dari tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 16. Frekuensi Kunjungan Kapal Perikanan



Frekuensi kunjungan kapal perikanan pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan kecenderungan penurunan tipis secara tahunan. Secara agregat, total kunjungan kapal pada 2025 tercatat sebanyak 7.309 kali, lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 7.434 kali, atau mengalami penurunan sekitar 1,68%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun volume dan nilai produksi pada 2025 mengalami peningkatan, intensitas kunjungan kapal tidak meningkat secara proporsional, sehingga terdapat indikasi peningkatan efisiensi atau perubahan pola operasi armada.

Secara bulanan, sebagian besar bulan pada 2025 mengalami penurunan jumlah kunjungan dibandingkan periode yang sama pada 2024. Penurunan paling menonjol terjadi pada Juli, yaitu sekitar 19,83%, yang kemungkinan berkaitan dengan faktor cuaca pertengahan tahun yang kurang kondusif sehingga membatasi aktivitas melaut dan frekuensi bongkar. Penurunan yang cukup besar juga terlihat pada Mei, Agustus, dan September, yang secara umum merupakan periode transisi musim dengan tingkat ketidakpastian cuaca yang relatif tinggi. Kondisi ini mencerminkan sensitivitas frekuensi kunjungan kapal terhadap faktor alam, terutama keselamatan pelayaran dan kelayakan operasi penangkapan. Namun demikian, terdapat beberapa bulan yang menunjukkan peningkatan kunjungan kapal pada 2025, khususnya Maret, November, dan Desember. Kenaikan yang sangat signifikan pada Desember, mencapai sekitar 60,09%, menunjukkan adanya lonjakan aktivitas bongkar pada akhir tahun.

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan membaiknya kondisi cuaca, meningkatnya intensitas operasi kapal menjelang penutupan tahun, serta dorongan permintaan pasar yang lebih tinggi. Kenaikan pada November dan stabilitas pada Oktober juga mengindikasikan pemulihan aktivitas armada setelah periode penurunan pada pertengahan tahun.

5. Pendapatan Pelabuhan

Pada tahun 2025 jumlah pendapatan PPN Brondong sebesar Rp.2.885.707.804,- dan mengalami peningkatan dibandingkan pendapatan tahun 2024 dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini.

Tabel 8. Pendapatan Pelabuhan Per Bulan

No.	Bulan	PNBP		+/-
		2024	2025	(%)
1	Januari	156.682.820	158.561.650	1,62%
2	Februari	186.060.599	185.146.276	2,68%
3	Maret	205.532.889	119.612.794	-37,35%
4	April	158.812.225	152.458.934	-2,33%
5	Mei	204.185.899	429.441.887	110,32%
6	Juni	172.698.347	235.507.422	36,37%
7	Juli	319.110.588	165.606.586	-48,10%
8	Agustus	199.722.453	176.357.862	-11,70%
9	September	218.790.282	227.483.132	3,97%
10	Oktober	239.953.188	403.295.499	68,07%
11	November	232.549.954	328.952.749	41,45%
12	Desember	339.482.503	303.283.013	1,57%
Total		2.633.581.747	2.885.707.804	12,33%

Sumber Data : Aplikasi SSDPNBP Kemenkeu

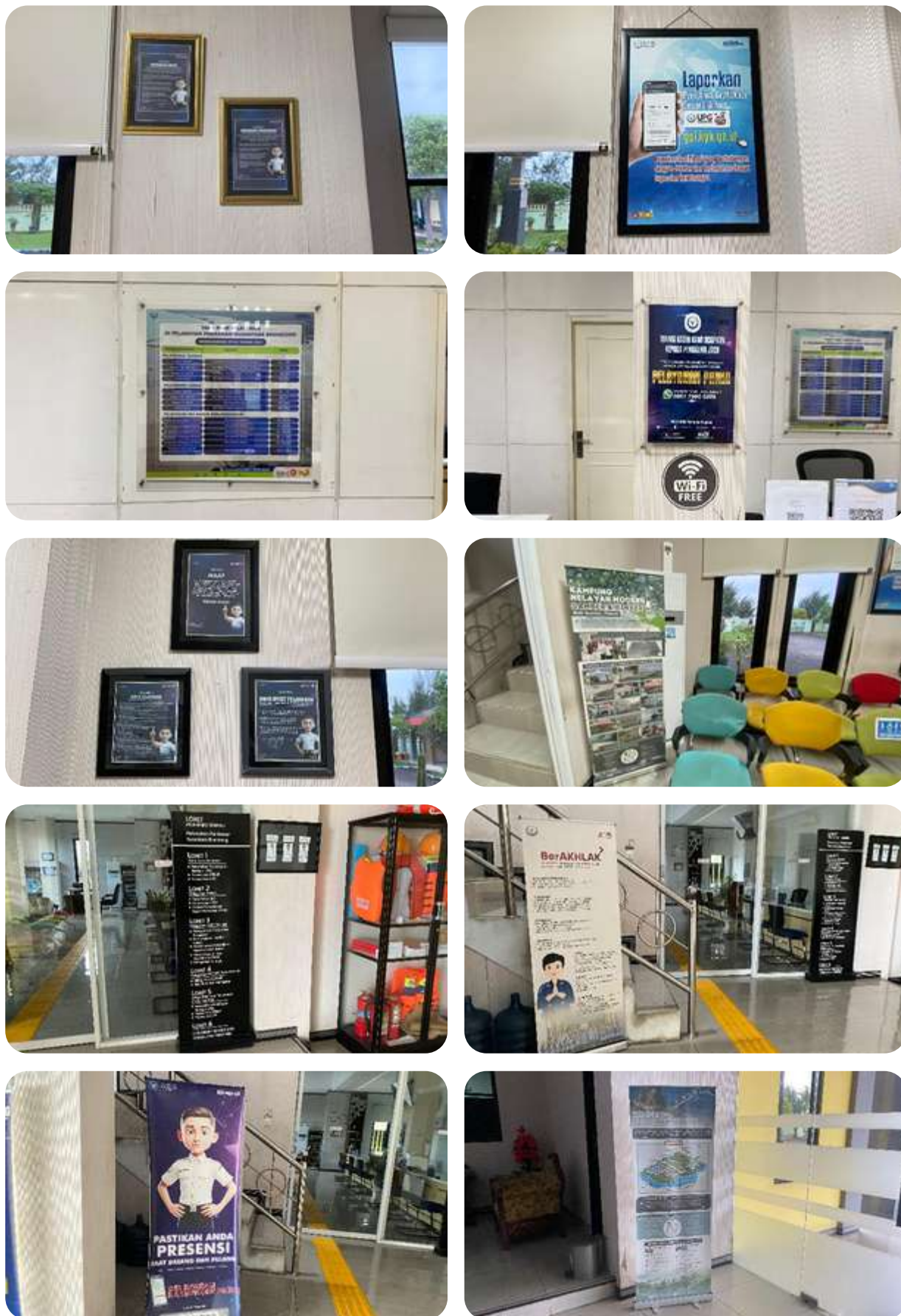
Pendapatan pelabuhan di PPN Brondong berasal dari penyelenggaraan fungsi perusahaan berupa pelayanan jasa dan pelayanan sewa. Pelayanan jasa terdiri dari jasa pas masuk, jasa tambat, jasa kebersihan kolam pelabuhan, jasa listrik, jasa air, jasa bengkel dan jasa penumpukan barang.

6. Fasilitas Penyuluh, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi

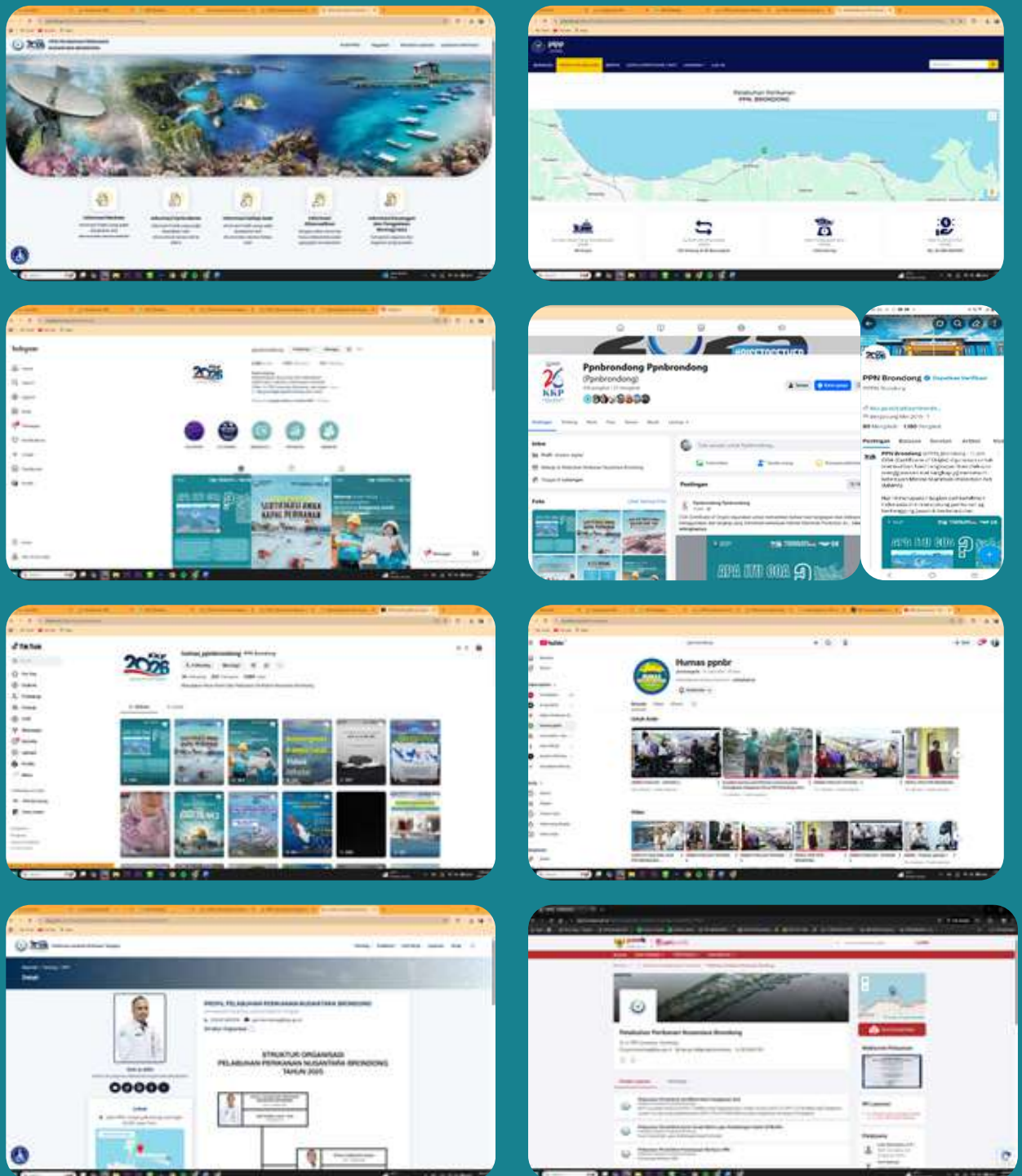
Kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan di PPN Brondong dilaksanakan oleh Satuan Pengawas PSDKP Lamongan. Kegiatan fasilitasi penyuluhan dan perkarantinaan ikan di PPN Brondong tidak ada, hal ini disebabkan karena tidak adanya penempatan personil dari instansi terkait yang menangani tugas tersebut.

Kegiatan publikasi di PPN Brondong dilaksanakan melalui media offline dan online. Publikasi melalui media offline (dapat dilihat pada gambar 15), antara lain pemasangan banner, spanduk, leaflet, buku profil PPN Brondong, buku statistik PPN Brondong, laporan tahunan, dan laporan kinerja. Publikasi melalui media online seperti yang terlihat pada gambar 16 berikut antara lain: Humas PPN Brondong (Facebook), ppnbrondong (Instagram), @PPN_Brondong (Twitter), PIPP, dan <https://kkp.go.id/djpt/ppnbrondong> (Website) dan media online lainnya.





Gambar 17. Dokumentasi Publikasi Offline di PPN Brondong



Gambar 18. Dokumentasi Publikasi Online di PPN Brondong

7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh PPN Brondong pada TA. 2025 sebagaimana matrik tabel dibawah ini:

Tabel 9. Kegiatan di PPN Brondong Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Dokumentasi
1	Sosialisasi Digitalisasi SHTI	20 orang	
2	Sosialisasi Certificate of Admisibility (COA)	30 orang	
3	Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dengan Nelayan Ujung Pangkah	26 orang	
4	Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dengan Nelayan Lumpur - Gresik	76 orang	
5	Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dengan Nelayan Mayangan	47 orang	

8. Pelaksanaan K5

Dalam mewujudkan konsep Pelabuhan Perikanan yang bersih, sehat, indah dan nyaman, maka PPN Brondong melaksanakan kegiatan K5 yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja. Kegiatan K5 dilaksanakan oleh 24 orang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang terdiri dari petugas keamanan 9 orang dan petugas kebersihan 15 orang. Petugas keamanan mempunyai tugas menjaga kamtibmas di kawasan PPN Brondong seperti yang terlihat pada gambar 17 di bawah ini dengan melalui kegiatan antara lain:

- Melakukan penjagaan di Pos Masuk, Pos Kantor dan Pos Kesyahbandaran.
- Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk kawasan PPN Brondong pada pagi dan sore hari.
- Melakukan patroli rutin pada kawasan PPN Brondong.



Gambar 19. Kegiatan K5 (Keamanan dan Ketertiban)

Petugas kebersihan mempunyai tugas menjaga kebersihan dan keindahan kawasan pelabuhan melalui kegiatan antara lain dan dapat dilihat pada gambar 18 berikut ini:

- Membersihkan kawasan PPN Brondong dan area Kantor.
- Membuang sampah ke TPA.
- Merapikan tanaman dan rumput dengan memotong secara periodik.
- Melakukan penanaman dan perawatan tanaman di kawasan PPN Brondong.



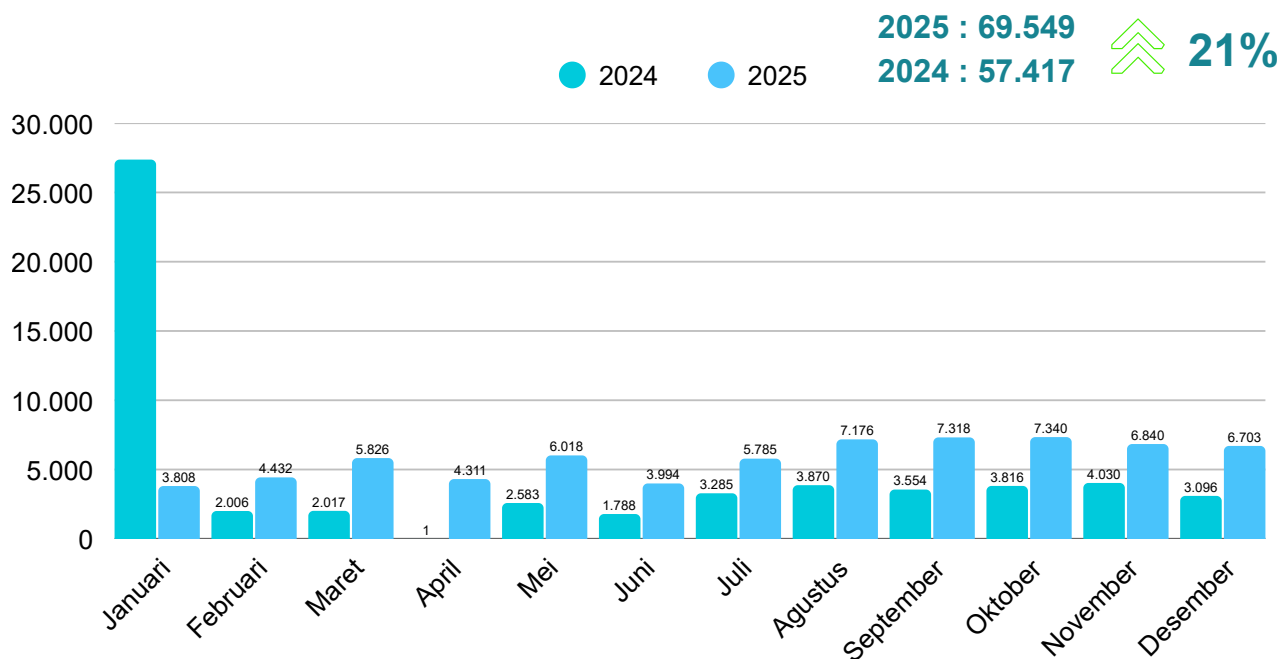
Gambar 20. Dokumentasi K5 (Kebersihan, Keindahan dan Keselamatan Kerja)

9. Penyaluran Air Bersih, Es dan BBM

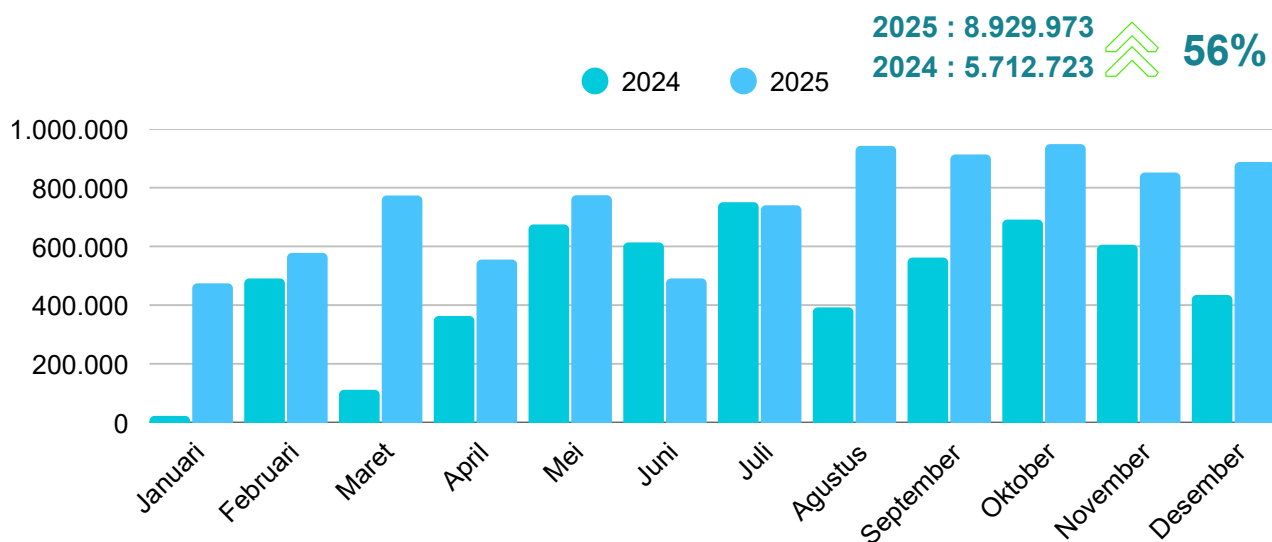
Penyaluran logistik pada kapal perikanan pada tahun 2025 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2024. Solar terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 79% , Es terjadi kenaikan sebesar 17% dan Air terjadi kenaikan sebesar 36% dibanding tahun sebelumnya. Data penyaluran solar, es dan air per bulan dapat dilihat pada Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17 dibawah ini:

Tabel 10. Penyaluran Solar

No.	Bulan	Solar (Liter)		+/-
		2024	2025	(%)
1	Januari	263.614	840.200	219%
2	Februari	63.239	1.038.970	1543%
3	Maret	692.403	1.383.827	100%
4	April	240.165	1.001.425	317%
5	Mei	29.238	1.354.775	4534%
6	Juni	129.846	896.725	591%
7	Juli	267.400	1.675.634	527%
8	Agustus	479.288	1.745.367	264%
9	September	158.628	1.723.025	986%
10	Oktober	413.088	1.699.275	311%
11	November	609.191	1.626.795	167%
12	Desember	116.756	1.553.680	1231%
Total		3.462.856	16.539.698	378%



Gambar 21. Data Penyaluran Es



Gambar 22. Data Penyaluran Air

10. Penyerapan Tenaga Kerja

PPN Brondong yang menjadi pusat kegiatan perikanan hulu sampai hilir di pesisir utara Lamongan mempunyai dampak terhadap penyerapan tenaga kerja seperti tabel 18 berikut ini:

Tabel 11. Penyerapan Tenaga Kerja

Kategori		Tenaga Kerja (Orang)	
		2024	2025
Nelayan		9.647	10.880
Non Nelayan		3.161	3.161
a	Bakul kecil	130	130
b	Pegawai	291	291
c	Penjual/agen	118	118
d	Tukang becak	270	270
e	Tenaga sortir	1.557	1.557
f	Kuli pikul	435	435
g	Tenaga kerja lain (tenaga bongkar dari palkah, tenaga fillet, karyawan toko dan warung dan tenaga buruh agen)	360	360
Total		12.808	14.041

Pada tahun 2025, aktivitas perikanan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14.041 orang atau meningkat 9,63 % dibandingkan tenaga tahun 2024 yaitu 12.808 orang berdasarkan jenis pekerjaannya.

11. Investor di Pelabuhan Perikanan

Investasi di PPN Brondong berjumlah 128 investor yang terdiri dari jenis usaha pembekuan ikan, pengepakan ikan, distribusi ikan segar, kios pesisir, pertokoan, dan SPDN. Data investor di PPN Brondong dapat dilihat pada uraian dan gambar dibawah ini.

95	Pengepakan Ikan	5	Pertokoan
6	Penjualan Es	1	SPBUN
13	Warung Makan	1	Gudang Basket (Trace)
5	Cold Storage		
1	Koperasi		
1	Gudang Garam		



Gambar 23. Dokumentasi Investor di PPN Brondong

12. Penyerapan Anggaran

a. Pagu Anggaran

Pagu anggaran PPN Brondong TA. 2025 sebesar Rp.15.058.405.000,- Berdasarkan jenis belanja, alokasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar 50,63%, belanja barang 44,75% dan belanja modal 4,61%. Berdasarkan jenis kegiatan, alokasi terbesar pada Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 92,53 %, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan sebesar 7,22 %, Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar 0,26 % Pagu Awal PPN Brondong Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 11. Pagu Anggaran PPN Brondong TA. 2025 (Awal)

NO	Kode Nama Kegiatan	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
1	2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	-	1.086.708.000	-	1.086.708.000
2	2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	38.689.000	-	38.689.000
3	2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	7.624.454.000	5.613.791.000	694.763.000	13.933.008.000
		7.624.454.000	6.739.188.000	694.763.000	15.058.405.000

Pagu anggaran PPN Brondong berubah menjadi Rp.16.972.673.000,- atau terjadi Penambahan sebesar Rp.1.914.268.000,- dikarenakan adanya penambahan belanja pegawai. Berdasarkan jenis belanja, alokasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar 58,07%, belanja barang 37,90 % dan belanja modal 4,03%. Berdasarkan jenis kegiatan, alokasi terbesar pada Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 93,59 %, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan sebesar 6,40 %, pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar 0,01%. Pagu perubahan PPN Brondong Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel

Tabel 12. Pagu Anggaran PPN Brondong TA. 2025 (Revisi)

NO	Kode Nama Kegiatan	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
1	2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	-	1.086.708.000	-	1.086.708.000
2	2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	1.680.000	-	1.680.000
3	2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	9.855.336.000	5.344.669.000	684.280.000	15.884.285.000
		9.855.336.000	6.433.057.000	684.280.000	16.972.673.000

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran PPN Brondong tahun anggaran 2025 sebesar Rp.15.299.252.657,- atau 96,32%. Rincian dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 13. Realisasi Anggaran PPN Brondong TA.2025

NO	Kode Nama Kegiatan	Pegawai	Barang	Modal	Total
1	2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	-	463.125.801	-	463.125.801
2	2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	1.680.000	-	1.680.000
3	2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	9.277.005.706	5.338.544.952	683.701.999	15.299.252.657
		9.277.005.706	5.338.544.952	683.701.999	15.764.058.458

Berdasarkan tabel 22 diatas, jenis belanja dari realisasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar 94,13%, belanja barang 90,21% dan belanja modal 99,92%. Berdasarkan jenis kegiatan realiasi anggaran pada kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 42,62%, Pengelolaan Sumber Daya Ikan 100% dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap 96,32%. Realisasi anggaran PPN Brondong Tahun Anggaran 2025.

13. Pelayanan Publik

a. Pelayanan Administrasi

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, PPN Brondong menyelenggarakan pelayanan publik kategori administrasi yaitu (1) Pelayanan Persejutan Belayar (SPB), (2) Pelayanan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLK Kedatangan), (3) Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang terdiri dari Lembar Awal (LA), Lembar Turunan (LT), Lembar Turunan Diserdehanakan (LTS), Impor/Pernyataan Pengolahan, dan Certificate Of Admissibility (COA) Capaian pelayanan administrasi di PPN Brondong tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 23. Capaian Pelayanan Administrasi di PPN Brondong Tahun 2025

b. Pelayanan Pengusahaan

Dalam melaksanakan fungsi pengusahaan, PPN Brondong menyelenggarakan pelayanan publik kategori pengusahaan yaitu (1) Pelayanan jasa pas masuk (2) Pelayanan tambat labuh, (3) Pelayanan jasa air, (4) Pelayanan jasa listrik, (5) Pelayanan jasa penumpukan barang, (6) Pelayanan jasa bengkel, (7) Pelayanan jasa kebersihan

kolam pelabuhan, (8) Pelayanan sewa unit pendingin, dan (9) Pelayanan sewa lahan dan bangunan. Capaian pelayanan perusahaan di PPN Brondong tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 14. Capaian Pelayanan Perusahaan di PPN Brondong
Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah	Volume
1	Pelayanan jasa pas masuk	161.805	444.444.000
2	Pelayanan jasa pas langganan	962	73.680.000
3	Pelayanan tambat labuh	409	17593 Etmal
4	Pelayanan jasa air di Kapal	3.492	12668 M3
5	Pelayanan Jasa Air Di Outlet	825	17548 M3
6	Pelayanan jasa listrik	1.096	132958 Kwh
7	Pelayanan jasa penumpukan	5.758	24.839.000
8	Pelayanan jasa bengkel	94	94
9	Pelayanan jasa kebersihan kolam	409	18958 Etmal
10	Pelayanan sewa unit pendingin	3	19908032 Kg
11	Pelayanan sewa lahan dan	128	128
12	Pelayanan BPN	2	2
13	Pelayanan Sewa Alat Berat (Truck	1	1

c. Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran:

- 1.Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan,
- 2.Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 3.Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik,
- 4.Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di PPN Brondong data dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 15. Nilai IKM PPN Brondong Tahun 2025

No.	Periode	Jumlah Responden	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Triwulan I	83	92,54	A	Sangat Baik
2	Triwulan II	133	90,16	A	Sangat Baik
3	Triwulan III	126	93,3	A	Sangat Baik
4	Triwulan IV	115	92,66	A	Sangat Baik

14. Jumlah Uang Beredar

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memiliki banyak sektor dalam menentukan dan menganalisis jumlah uang beredar, Jumlah uang beredar di PPN Brondong berasal dari nilai produksi ikan yang didaratkan, nilai produksi ikan dari luar, nilai es dari luar, pendapatan warung dan kios, buruh sortir, kuli pikul, dan buruh fillet. Pada tahun 2025, jumlah uang beredar di PPN Brondong mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.135.603.642.700 atau - 0,25% dibandingkan jumlah uang beredar pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.132.720.887.113. Jumlah uang beredar dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 16. Jumlah Uang Beredar

No.	Uraian	Uang Beredar (Rp)		+/- (%)
		2024	2025	
1	Nilai produksi ikan yang didaratkan	1.046.549.243.467	1.090.347.533.000	4,19%
2	Nilai Produksi Ikan dari luar	52.321.224.000	9.994.304.000	-80,90%
3	pendapatan perum	-	-	0,00%
4	nilai es dari luar	26.286.039.646	28.060.715.700	6,75%
5	pendapatan warung kios	469.580.000	611.640.000	30,25%
6	buruh sortir	3.735.500.000	3.290.000.000	-11,93%
7	kuli pikul	2.081.100.000	1.892.700.000	-9,05%
8	buruh fillet	1.278.200.000	1.406.750.000	10,06%
Total		1.132.720.887.113	1.135.603.642.700	0,25%

15. Jumlah Kapal Perikanan

Kapal dan alat penangkap ikan merupakan komponen utama dalam kegiatan operasi penangkapan ikan. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 506 unit kapal perikanan yang beraktivitas dan berpangkalan di PPN Brondong yang terdiri dari :

- Sebanyak 425 kapal dengan alat tangkap jaring tarik berkantong,
- Sebanyak 51 kapal dengan alat tangkap pancing ulur,
- Sebanyak 13 kapal dengan alat tangkap rawai,
- Sebanyak 7 kapal dengan alat tangkap purse seine,
- Sebanyak 4 kapal dengan alat tangkap gillnet, dan
- Sebanyak 6 kapal pengangkut ikan.

Adapun Keragaan kapal perikanan yang beraktivitas di PPN Brondong dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 24. Keragaan Kapal Perikanan di PPN Brondong

16. Pengembangan SDM Pengelola Pelabuhan

Pengembangan kompetensi merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia aparatur dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Sebagai bentuk pengembangan kompetensi, PPN Brondong memberikan kesempatan yang salam bagi pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Bentuk pengembangan SDM yang telah diikuti oleh pegawai di PPN Brondong meliputi:

1. Pengembangan Kompetensi melalui pelatihan klasikal melalui diklat teknis, diklat fungsional, bimbingan teknis, seminar dan workshop yang dilaksanakan secara luring maupun daring;
2. Coaching dan Mentoring melalui pembinaan pegawai;
3. E-Learning / Pelatihan Jarak Jauh;
4. Pembelajaran Alam Terbuka / Outbond dalam rangka pemantapan tugas pokok dan fungsi menunjang pelayanan prima;
5. Study Tiru ke Pelabuhan Perikanan dan Instansi terkait.

Sebagai salah satu tolak ukur dalam pengembangan SDM adalah IP-ASN yang merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. IP ASN digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi hal ini dapat dilihat pada capaian kinerjanya dan sebagai pengembangan diri dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas pegawai ASN. Pada tahun 2025 nilai IP ASN di PPN Brondong pada kategori tinggi dengan nilai 91,67. Berikut ini gambar 25 mengenai berbagai kegiatan tentang pengembangan SDM di PPN Brondong.



Gambar 25. Dokumentasi Pengembangan SDM di PPN Brondong

17. Pengembangan dan Pemeliharaan Saran Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pada tahun 2025 pelaksanaan peningkatan fasilitas di PPN Brondong melalui kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Uraian kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan masing-masing dapat dilihat pada tabel 17 – tabel 20 berikut ini :

Tabel 17. Pengembangan Prasarana Pelabuhan 2025

No	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas	Volume	Sumber Dana
1	Rehabilitasi Gedung Pelayanan	1 Paket	RM
2	Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah	1 Paket	RM

Tabel 18. Pemeliharaan Prasaran Pelabuhan Tahun 2025

No	Pemeliharaan Fasilitas	Volume	Sumber Dana
1	Pemeliharaan Gedung Coldstorage 100 Ton	1 Paket	RM
2	Pemeliharaan Leaderhouse	1 Paket	RM
3	Pemeliharaan Masjid Pelabuhan	1 Paket	RM
4	Pemeliharaan Gedung PPDl	1 Paket	RM
5	Pemeliharaan Kantor Pelayanan	1 Paket	RM
6	Pemeliharaan Jalan Kompleks	1 Paket	RM
7	Pemeliharaan Gedung Laboratorium	1 Paket	RM
8	Pemeliharaan Tempat Kontainer Sampah	1 Paket	RM
9	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	RM
10	Pemeliharaan Rumah Travo ICS 400	1 Paket	RM
11	Pemeliharaan Jalan Kompleks Outlet Pengepakan Ikan	1 Paket	RM
12	Pemeliharaan Tandon Air	1 Paket	RM

Tabel 19. Pengembangan Sarana Pelabuhan Tahun 2025

No	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas	Volume	Sumber Dana
1	Laptop	13 Unit	PNBP
2	Printer	4 Unit	PNBP
3	Tablet	5 Unit	PNBP
4	Speaker Aktif Audio Sound System	2 Unit	PNBP
5	Televisi	2 Unit	PNBP

Tabel 20. Pemeliharaan Sarana Pelabuhan Tahun 2025

No	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas	Volume	Sumber Dana
1	Pemeliharaan Operasional Bengkel	1 Tahun	RM
2	Pemeliharaan AC	45 Unit	RM
3	Pemeliharaan dan Operasional Mesin	2 Unit	RM
4	Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	RM
5	Pemeliharaan CCTV	7 Unit	RM
6	Pemeliharaan Printer dan Laptop	40 Unit	RM
7	Pemeliharaan Sound System	5 Unit	RM
8	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	5 Unit	RM
9	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	20 Unit	RM
10	Pemeliharaan Kendaraan Lapangan	1 Unit	RM
11	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	2 Unit	RM
12	Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	3 Unit	RM
13	Pemeliharaan Genset 100 kVA	3 Unit	RM
14	Pemeliharaan Portal Gate	1 Unit	RM

Beberapa kegiatan pengembangan fasilitas di PPN Brondong selama tahun 2025 ada rehabilitasi akses bongkar muat, rehabilitasi lahan parkir serta pemeliharaan fasilitas lampu suar dan dapat dilihat pada gambar 21 berikut ini:



Gambar 26. Dokumentasi Pengembangan Fasilitas di PPN Brondong

18. Penghargaan yang diperoleh

Dalam melaksanakan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memperoleh penghargaan sebagai Unit Organisasi dengan Predikat “INFORMATIF”.



Gambar 28. Piagam Penghargaan PPN Brondong Tahun 2025

Bab III. Program Kerja KKP 2026

Pada tahun 2026, PPN Brondong ikut mendukung komitmen KKP dalam mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045 dengan mengelola potensi pangan biru dalam mendukung swasembada pangan Indonesia. Sejalan dengan itu, arah kebijakan dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagai pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut, yang diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota;
3. pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan

Bab IV. Penutup

Laporan Tahunan PPN Brondong Tahun 2025 merupakan laporan pelaksanaan kinerja operasional PPN Brondong Tahun 2025 yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025 yang telah memberikan dampak positif. Berbagai hasil pengelolaan pelabuhan perikanan yang telah tercapai dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat, menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan serta mewujudkan keberlanjutan.

Seluruh target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah tercapai, hal itu menjadi tantangan di Tahun 2026 untuk terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja untuk mencapai target yang akan ditetapkan. Keberhasilan, permasalahan dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2025, akan dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja periode selanjutnya.

Sangat disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh jajaran PPN Brondong. Untuk itu sangat diperlukan sinergi internal PPN Brondong dan dukungan lintas sektor serta Lembaga terkait lainnya, juga dukungan para stakeholder kelautan dan perikanan dalam rangka Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.